

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan.

UU Minerba merupakan strategi bagi pemerintah untuk mempromosikan sekaligus meningkatkan Foreign Direct Investment kepada seluruh para pelaku usaha industri pertambangan untuk membangun smelter di dalam negeri. Adapun tujuan pemerintah mendorong para pelaku usaha industri pertambangan untuk membangun smelter adalah untuk mencapai kepentingan ekonomi Indonesia yakni sebagai peneyemangat untuk mendorong industri hilir, meningkatkan lapangan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, meningkatkan pendapatan pusat dan daera serta masih banyak lagi kepentingan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat maupun daerah dari upaya mendorong pelaku usaha industri pertambangan untuk mengembangkan smelter. Kepentingan ini seakan menjadi roda penggerak bagi pemerintah di dalam upaya mendorong pembangunan smelter di Indonesia.

Dalam upaya mengembangkan smelter di dalam negeri banyak para pelaku industri pertambangan banyak menuai kendala yang harus dihadapi di hadapi oleh mereka. Kendala tersebut berakibat pada lambannya proses pengembangan smelter yang dilakukan oleh pelaku industri pertambangan. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain pertama, kurangnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung dalam pengembangan indsutri smelter tersebut, seperti akses tranportasi yang kurang memadai, sulit untuk mendapat akses listrik dan pelabuhan yang tidak efisien. Kedua, ketidakjelasan tata ruang yang memadai dalam pengembangan industri smelter tersebut, yang mana pada hal tersebut masih terjadi tumpang tindih dengan tata ruang kehutanan pemukiman dan rencana tata ruang wilayah. Ketiga, mahalnya biaya pengembangan industri smelter, dan ini adalah kendala yang menjadi penghalang utama dalam pengembangan industri smelter. Dengan mahalnya biaya pengembangan industri tersebut membuat para pelaku industri pertambangan merasa terbebani dalam melakukan pengembangan smelter itu.

Hal ini tentu bisa dirasakan secara langsung di dalam proses pengembangan smelter yang berjalan lambat dan tak kunjung selesai hingga saat ini. Dengan

terhambatnya proses pengembangan smelter ini, maka hal tersebut memberikan pengaruh negatif kepada aktivitas ekspor Indonesia kepada negara yang membutuhkan hasil nikel Indonesia. Salah satu negara yang merasakan pengaruh dari larangan ekspor Indonesia terhadap nikel mentah adalah Tiongkok. Dengan terjadinya larangan ekspor Indonesia tersebut memberikan permasalahan kepada Tiongkok, Salah satu masalah yang dirasakan Tiongkok akibat terhentinya ekspor Indonesia adalah kekurangan bahan baku untuk industrinya. Walaupun hal itu sempat dapat diatasi akan tetapi kekurangan bahan baku nikel masih dirasakan oleh Tiongkok. Salah satu upaya yang mungkin bisa membantu Tiongkok untuk mengembalikan kuota ideal Nikel bagi industri Tiongkok adalah ikut serta dalam pengembangan smelter di Indonesia yang mana hal tersebut dapat membantu Tiongkok untuk memenuhi kuota nikel mereka lagi. Dengan adanya kesempatan tersebut pemerintah telah berupaya untuk menarik minat Tiongkok untuk ikut berinvestasi dibidang smelter nikel ini. salah satu upaya pemerintah adalah melalui promosi FDI. Promosi FDI, yaitu aktivitas mempromosikan smelter ke luar negeri dengan tujuan untuk mendatangkan investasi asing ke Indonesia terlebih dalam pembangunan smelter tersebut.

Realisasi dari aktivitas diplomasi komersial (promotion of FDI) yang dilakukan pemerintah yakni melakukan promosi FDI ke Tiongkok dengan tujuan agar Tiongkok mau ikut serta berkerjasama dan berinvestasi dalam pengembangan industri smelter nikel di Indonesia. Dipilih nya Tiongkok menjadi target utama dalam kegiatan diplomasi komersial Indonesia dilatar belakangi oleh 2 alasan yaitu, pertama, Tiongkok merupakan konsumen terbesar nikel Indonesia, hal itu di tujukan dengan 60 % kebutuhan nikel Tiongkok selalu di penuhi dari hasil impor nikel Indonesia. Dengan ketergantungan Tiongkok terhadap nikel Indonesia kemungkinan juga Tiongkok juga akan tertarik dalam pengembangan indsutri smelter juga. Kedua, tingkat investasi Tiongkok yang selalu mengalami trend positif di semua bidang di Indonesia. Dengan trend positif investasi Tiongkok di Indonesia diharapkan investasi Tiongkok akan menular dalam pengembangan industri smelter nikel di Indonesia.

Aktivitas promosi FDI yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok di wujudkan dalam beberapa bentuk yaitu pertama, bisnis forum, dalam kegiatan ini Indonesia berupaya untuk mempromosikan peluang dan keuntungan yang akan di terima oleh para investor Tiongkok jika ikut berinvestasi dalam pengembangan smelter

tersebut. bisnis forum selalu diadakan oleh pemerintah Indonesia tiap tahunnya dari tahun 2014 sampai sekarang ini. kedua, kunjungan kerja, dalam kegiatan ini pemerintah biasanya diwakili oleh instansi terkait untuk mempromosikan smelter nikel di Tiongkok, instansi tersebut adalah BKPM. Untuk mempromosikan peluang investasi smelter nikel BKPM juga melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Tiongkok seperti yang terjadi pada tahun 2016, yang mana pada tahun tersebut kepala BKPM melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk membicarakan kerjasama dalam pengembangan industri smelter. Ketiga, match making, kegiatan ini merupakan kegiatan yang mempertemukan antara pelaku usaha pertambangan Indonesia dengan pelaku usaha pertambangan Tiongkok. Tujuan pertemuan ini adalah agar kedua pelaku usaha industri ini dapat saling membagi pengalaman dan peluang mengenai industri smelter di Indonesia dan diharapkan dengan matchmaking para pengusaha Tiongkok dapat lebih yakin lagi untuk berinvestasi di bidang smelter nikel Indonesia.

Diplomasi komersial ini dibutuhkan sebagai suatu kerangka kerja sama yang akan mengakomodasi kepentingan pemerintah dan pelaku bisnis sekaligus. Para pelaku bisnis membutuhkan peran pemerintah dalam hal liberalisasi perdagangan, melindungi hak kekayaan intelektual, mengurangi hambatan peraturan bisnis, dan mendorong keberlangsungan integrasi ekonomi. Sedangkan manfaat diplomasi komersial yang diperoleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Dari sini bisa kita lihat bahwa dari diplomasi komersial ini, Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan ekonominya berupa pengembangan smelter di dalam negeri dan pelaku industri pertambangan memiliki kepentingan berupa mengurangi hambatan-hambatan yang berlaku atas kebijakan UU Minerba serta untuk tetap berlanjutnya industri mereka di Indonesia serta bagi Tiongkok akan dapat meningkatkan nilai investasinya di Indonesia dan juga tidak kekurangan lagi dalam kebutuhan nikel di Tiongkok berkat kerjasama dalam pengembangan industri smelter di Indonesia.

6.2 Saran.

Dari penjelasan yang telah di jelaskan sebelumnya tentang upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Tiongkok dalam pengembangan industri smelter nikel dalam negeri, penulis menyarankan pemerintah harus lebih aktif lagi dalam berinteraksi

dengan Tiongkok baik itu pemerintahannya ataupun para pengusaha Tiongkok tersebut dalam mempromosikan peluang investasi yang sebesar-besarnya dalam industri smelter nikel ini. dan daripada itu supaya kegiatan promosi investasi dalam bidang smelter Indonesia harus menemukan cara baru yang lebih efisien lagi dalam mempromosikan investas ini agar para investor Tiongkok lebih tertarik dan mau untuk meningkatkan nilai investasinya di bidang smelter. tindakan atau kegiatan itu seperti pameran industri yang mengundang para perwakilan perwakilan asing untuk menyaksikannya.

Berikutnya pemerintah harus fokus juga terhadap kebijakan pasca terjadinya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor Tiongkok di bidang industri smelter nikel ini, agar para investor dapat lebih di mudahkan dan dapat juga terbantu dalam menyelesaikan permasalahan pasca investasi melalui kebijakan yang telah di terapkan pemerintah tersebut. hal ini termasuk juga upaya untuk menjaga kestabilan investasi yang datang dari para pengusaha Tiongkok dalam pengembangano industri smelter nikel ini.

Dari beberapa saran tersebut, diharapkan pemerintah dapat terbantu untuk meningkat intesitas investasi dalam bidang smelter nikel ini. Dengan meningkatnya investasi akan berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi Indonesia dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

